

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP PENGAMANAN ASET TETAP DAERAH

Riski Eka Nursafitri¹⁾, Sari Andayani²⁾

Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

riskiekans04@gmail.com¹⁾, sariandayani.ak@upnjatim.ac.id²⁾

ABSTRACT

Activities in government agencies are closely related to the use of fixed assets for both operational activities and services to the community. So that the responsibility to maintain its security must be carried out properly. Problems that often occur in regional fixed assets are the lack of orderly management of asset ownership documents, maintenance of assets that are less efficient, dan the existence of assets that have not been certified. Based on these problems, this study was conducted to determine dan analyze the influence of human resource competence, the use of information technology, and internal government control systems on the security of regional fixed assets. In this quantitative research, the sample used consisted of 53 employees who worked in the Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, dan Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Kota Surabaya. Researchers conducted data analysis through the Partial Least Square (PLS) method and hypothesis testing can be concluded that the internal control system implemented by the government has a significant influence on security of regional fixed assets, then in terms of the utilization of information technology and the small number of human resource competencies show no significant influence on the security of regional fixed assets.

ABSTRAK

Aktivitas pada instansi pemerintahan erat kaitannya dengan penggunaan aset tetapbaik untuk kegiatan operasional maupun pelayanan kepada masyarakat. Sehingga tanggungjawab untuk menjaga keamanannya harus terlaksana dengan baik. Permasalahan yang sering terjadi pada aset tetap daerah yaitu belum tertibnya penatausahaan dokumen kepemilikan aset, pemeliharaan aset yang kurang efisien, dan adanya aset yang belum tersertifikasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pengamanan aset tetap daerah. Dalam penelitian kuantitatif ini, sampel yang digunakan terdiri atas 53 pegawai dari jumlah keseluruhan sebanyak 312 pegawai yang bekerja di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, dan Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Kota Surabaya. Peneliti melakukan analisis data melalui metode *Partial Least Square (PLS)* dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern yang diterapkan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pengamanan aset tetap daerah, kemudian dalam hal pemanfaatan teknologi informasi serta besar kecilnya kompetensi sumber daya manusia menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap pengamanan aset tetap daerah.

Kata kunci: kompetensi sumber daya manusia; pemanfaatan teknologi informasi; sistem pengendalian intern pemerintah; pengamanan aset tetap daerah.

1. PENDAHULUAN

Dalam instansi pemerintahan terdapat komponen utama yang sangat mendukung kelancaran aktivitas pemerintah yaitu aset tetap. Dari segi fungsinya, aset tetap berfungsi sebagai sarana dan prasarana untuk melakukan berbagai pelayanan. Dari segi nilainya, aset tetap memiliki nilai yang tinggi jika dibandingkan dengan jenis aset lainnya. Oleh sebab itu, proses penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan maksimal dengan tersedianya aset tetap yang memadai. Sehingga

perlu adanya manajemen pengelolaan aset yang baik untuk menjaga keamanan aset, mencegah terjadinya kerusakan atau hilangnya aset, status kepemilikan aset yang belum jelas, dan pelaporan aset yang tidak lengkap.

Aset tetap daerah termasuk bagian dari barang milik daerah yang prosedur pengelolaannya diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan yang dilakukan antara lain perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan,

pemeliharaan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan serta pengendalian.

Surabaya yang dikenal sebagai kota pahlawan menjadi pusat pemerintahan di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas aset-aset yang dimanfaatkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Selama tahun anggaran 2011-2020 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemeriksaan BPK berhasil dipertahankan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut dinyatakan wajar tanpa pengecualian karena telah disusun sesuai peraturan dan batas kewajaran yang normal, meskipun masih terdapat permasalahan terkait aset tetap yang belum terselesaikan seperti tanah bangunan milik daerah yang masih atas nama pihak lain, aset belum tersertifikasi, pemanfaatan dan pemeliharaan aset yang kurang efisien, serta belum tertibnya penatausahaan dokumen kepemilikan aset.

Keberhasilan pengamanan aset tetap daerah dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki sumber daya manusianya meliputi latar belakang pendidikan, tingkat pemahaman terkait aset tetap, dan pengalaman selama kerja dibagian aset tetap daerah (Aljufri Bokingo 2017). Apabila pemerintah gagal dalam mengamankan aset tetap daerah akan berdampak pada hilangnya aset tersebut hingga timbulnya kerugian bagi negara.

Memasuki era digitalisasi, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi dalam menunjang kegiatan operasional. Dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 upaya meningkatkan ketertiban pengamanan aset daerah diciptakannya suatu sistem informasi yang dikenal dengan SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah) yang telah diaplikasikan sejak tahun 2015. Menurut (Rosihan 2016) prinsip *stewardship* dapat terlaksana dengan baik jika sistem informasi dimanfaatkan secara maksimal. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian (Juliadi 2017) yang menyatakan sistem informasi manajemen aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan aset tetap.

Selain memanfaatkan teknologi, tindakan preventif dalam pengamanan aset yaitu sistem pengendalian intern pemerintah. Fokus utama dari sistem pengendalian intern yaitu pencegahan untuk meminimalisir

penyimpangan yang dapat merugikan daerah. Permasalahan aset tetap pada sistem pengendalian disebabkan oleh rendahnya kompetensi, kurangnya koordinasi, dan tidak dilaksanakannya penghapusan dan pendataan aset daerah (Hidayat 2017). Sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengamanan aset tetap. Hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian (Ekayanti 2018) dan (Juliadi 2017).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari tindakan yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan aset tetap daerah yang belum terselesaikan diantaranya permasalahan YKP, Bintang Osowilangun, Kolam Renang Brantas, Pasar Turi, dan permasalahan tanah aset pemkot di Jalan Ngagel yang terbit sertifikat atas nama pihak lain.

Dari penelitian yang telah dilakukan, masih jarang yang membahas tentang pengamanan aset tetap daerah khususnya pada Pemerintah Kota Surabaya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut. Karena tujuan dari penelitian ini supaya dipahami pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pengamanan aset tetap daerah yang kedepannya diharapkan mampu terlaksana secara optimal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori *Stewardship*

Dalam sektor publik, pemerintah merupakan pemegang amanah (*steward*) dan masyarakat sebagai pemberi amanah (*principal*). Hal tersebut sesuai dengan teori *Stewardship*, dimana pemegang amanah lebih termotivasi pada target atau tujuan utama organisasi, bukan untuk tujuan-tujuan individu (Yoyo 2017).

Masyarakat selaku *principal* menginginkan aset-aset milik daerah dikelola dan diamankan dengan baik sehingga dapat dipergunakan untuk fasilitas pelayanan publik. Sebagai pihak yang diberikan kepercayaan, pemerintah wajib mempertanggungjawabkannya.

2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Setiap organisasi atau instansi tentu memiliki sumber daya manusia yang menjadi faktor penggerak utama untuk mencapai tujuan. Kompetensi sesuai bidang pekerjaan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pegawai

dalam bekerja. Kompetensi yaitu kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atas dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dituntut oleh lingkungan kerja tersebut (Wibowo 2016).

Indikator pembentuk kompetensi sumber daya manusia yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Wibowo 2016). Pengetahuan yaitu informasi yang diketahui dan diperoleh melalui proses pembelajaran serta pengalaman. Pengetahuan dapat dikembangkan dengan keterampilan sehingga muncul inovasi baru dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

Semakin banyaknya sumber daya manusia yang kompeten pada instansi pemerintahan, maka pengelolaan terhadap aset daerah akan terlaksana dengan baik. Dalam penelitian (Wahyuni 2018) juga menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H1 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset tetap daerah

2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Definisi teknologi informasi yaitu perpaduan antara *hardware*, *software*, teknologi jaringan, database, dan pendukung telekomunikasi lainnya (Sutabri 2014). Pemanfaatan teknologi informasi pada organisasi atau instansi bertujuan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam melakukan pekerjaan, mengembangkan kreativitas, dan membantu memecahkan masalah. Teknologi yang dimanfaatkan secara optimal akan menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan menjadidasar pengambilan keputusan (Rahmawati 2018).

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya menggunakan aplikasi SIMBADA untuk penatausahaan dan pemantauan aset-aset daerah, serta memperkecil kesalahan data. Program aplikasi ini meliputi perencanaan kebutuhan aset, pengadaan aset, penatausahaan aset, penghapusan aset, dan akuntansi aset (Neraca). Keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur melalui jumlah komputer yang memadai untuk melaksanakan tugas, jaringan internet yang baik, aplikasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan, dan pemeliharaan peralatan yang rutin, serta adanya tenaga ahli teknis

(Yosefrinaldi 2013). Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H2 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset tetap daerah

2.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah proses pengendalian pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Penerapan SPIP bertujuan memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi dengan kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terdapat lima unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dan berkesinambungan. Sumber daya manusia di dalam organisasi merupakan fondasi utama yang membangun lingkungan pengendalian dalam mencapai sasaran.

Pengendalian intern dilakukan oleh pihak yang berwenang pada instansi pemerintahan dan pimpinan lembaga sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah, dan mencegah terjadinya penyimpangan yang menimbulkan kerugian. SPIP sangat penting keberadaannya dalam setiap instansi untuk dapat menciptakan lingkungan organisasi yang kondusif. SPIP dapat diciptakan dengan menjaga integritas, pemisahan tugas yang jelas, nilai etika seluruh komponen organisasi, dan rutin dilakukannya monitoring serta evaluasi untuk keseluruhan proses pengelolaan dan pengamanan aset. Sehingga semakin baik sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh setiap instansi maka semakin baik pengamanan aset tetap daerah yang dilakukan (Ekayanti 2018). Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H3 : Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset tetap daerah

2.5 Aset Tetap

PSAP No. 07 mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap yang

mendukung aktivitas instansi pemerintahan diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok yaitu tanah, bangunan, gedung, mesin, peralatan, jalan, irigasi, jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset militer. Jenis aset tetap pemerintah lainnya dapat berupa aset yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum seperti kontraktor, universitas, dan instansi pemerintah lain.

Pengakuan aset tetap diatur dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pencatatan setiap aset tetap pemerintah dilakukan secara tertib mulai perolehan aset hingga pelepasan aset berdasarkan bukti transaksi atau dokumen pendukung lainnya. Aset tetap akan mengalami penyusutan pada setiap periode. Besarnya penyusutan dicatat sebagai beban penyusutan dan akan mengurangi nilai perolehan aset yang ada dalam neraca.

Selain itu, dapat dilakukan penilaian kembali (*revaluation*) aset tetap untuk mencerminkan nilai aset tetap di masa sekarang. Revaluasi dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan terhadap nilai asset yang tercatat. Klasifikasi aset pemerintah yang dapat di revaluasi yaitu aset tetap dengan nilai perolehan cukup signifikan seperti tanah, gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan (PSAP No. 07). Sedangkan perlakuan untuk aset tetap yang tidak memiliki manfaat ekonomik di masa mendatang dapat diberhentikan atau dilepaskan secara permanen. Aktivitas penghentian dan pelepasan aset tetap harus dicatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan aset tersebut dieliminasi dari neraca (PSAP No. 07).

2.6 Pengamanan Aset

Pengamanan aset didefinisikan sebagai tindakan preventif dalam pengelolaan aset daerah yang dilakukan secara fisik, administratif, dan tindakan hukum. Pengamanan secara fisik, administrasi, dan hukum bertujuan agar aset terjaga keamanannya dan terhindar dari tindakan penyimpangan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal (Shabrina, 2014).

Dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa pengamanan fisik pada aset kendaraan meliputi pemasangan tanda kepemilikan, pemakaian sesuai tujuan, penyimpanan baik tertutup maupun terbuka.

Pengamanan fisik pada aset tidak bergerak seperti tanah, gedung, dan bangunan meliputi pemasangan papan tanda kepemilikan, pemagaran dan penjagaan.

Pengamanan administrasi pada aset kendaraan meliputi penatausahaan kelengkapan tanda kepemilikan seperti BPKP, faktur pembelian, STNK, Kartu Pemeliharaan, dan Berita Acara Serah Terima. Pengamanan administrasi pada aset tanah, gedung, dan bangunan meliputi penatausahaan, tanda kepemilikan seperti Akta jual beli, Surat Izin Mendirikan Bangunan, Berita Acara Serah Terima, Kartu Identitas Barang, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait dan diperlukan. Sedangkan pengamanan hukum dilakukan untuk menyelamatkan aset daerah yang diambil alih oleh pihak lain.

3. METODOLOGI

Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif, dimana peneliti menentukan populasi dan sampel untuk pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis dan uji hipotesis pada data yang bersifat statistik tersebut (Sugiyono 2018).

Uji hipotesis dilakukan pada variabel independen yang terdiri dari kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah, sedangkan variabel dependen yaitu pengamanan aset tetap daerah. Setiap variabel memiliki indikator-indikator penelitian sebagai berikut.

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator
Kompetensi Sumber Daya Manusia	- Pengetahuan - Keterampilan - Sikap (Wibowo 2016)
Pemanfaatan Teknologi Informasi	- Hardware - Software - Network - Ahli Teknisi (Sutabri 2014)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	- Lingkungan Pengendalian - Penilaian Risiko - Kegiatan Pengendalian - Informasi dan Komunikasi - Pemantauan (Republik, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern)

	Pemerintah 2008)
Pengamanan Aset Tetap Daerah	- Pengamanan Fisik - Pengamanan Administrasi - Pengamanan Hukum (Republik, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 2016)

Sumber : Diolah, 2021.

Populasi pada penelitian ini adalah pegawai Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah serta pegawai Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Kota Surabaya sebanyak 312 pegawai. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Nonprobability Sampling* berupa *Purposive Sampling*, dimana sampel ditentukan dengan cara menetapkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono 2018). Kriteria responden dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) Pegawai yang memiliki tugas dan tanggungjawab di bidang pengamanan aset daerah; 2) Pegawai yang memiliki tugas dan tanggungjawab mengoperasikan teknologi pendukung pengamanan aset daerah; dan 3) Pegawai yang memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan pengendalian intern dalam pengamanan aset daerah.

Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara langsung ke lokasi penelitian. Berdasarkan kriteria yang ada diperoleh sampel sebanyak 53 responden. Pengukuran variabel-variabel menggunakan tipe skala *Likert*.

Analisis data dan uji hipotesis dilakukan melalui analisis *Partial Least Square (PLS)* dengan *software SmartPLS 3.0*. Pengujian awal untuk menentukan tingkat validitas dan reliabilitas antara variabel laten dengan indikatornya dilakukan analisis *outer model* yang terdiri dari *convergent validity*, *discriminant validity*, *composite reliability*, dan *cronbach's alpha*. Kemudian dilakukan analisis *inner model* untuk memprediksi hubungan kausal antar variabel yang diuji. Analisis *Inner Model* terdiri dari Koefisien Determinasi dan *Predictive Relevance*.

Hipotesis yang ditetapkan di uji dengan kriteria sebagai berikut : 1) jika nilai *T-Statistics* >1,96 atau nilai probabilitas < 0,05 maka hipotesis dinyatakan diterima. 2) jika nilai *T-Statistics* < 1,96 atau nilai probabilitas > 0,05 maka hipotesis dinyatakan ditolak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Sampel pada penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, serta Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Kota Surabaya dengan jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 53 kuesioner. Berikut tabel penyebaran dan pengambilan kuesioner :

Tabel 2. Penyebaran dan Pengambilan Kuesioner

Keterangan	Total	Presentase
Kuesioner yang disebar	53	100%
Kuesioner yang kembali	53	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang pengisiannya tidak lengkap	0	0%
Kuesioner yang dapat diolah	53	100%

Sumber: Penulis, 2021

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner responden dikelompokkan sesuai dengan karakteristik sebagai berikut :

Tabel 3. Karakteristik Responden

Karakteristik	Responden	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin	Perempuan	15	28%
	Laki-laki	38	72%
Usia (Tahun)	20 - 27	23	43%
	28 - 34	12	23%
	35 - 41	7	13%
	42 - 48	6	11%
	49 - 55	5	10%
Pendidikan	SD	0	0%
	SMP	1	2%
	SMA / Sederajat	7	13%
	Diploma	1	2%
	S1	43	81%
	S2 / S3	1	2%

Sumber: Penulis, 2021

Dari tabel 3 diketahui bahwa responden laki-laki jumlahnya lebih banyak dibandingkan responden perempuan dan sebanyak 43% responden berusia antara 20 - 27 tahun. Pendidikan terakhir yang paling banyak di jenjang Strata satu (S1).

Tabel 4. Nilai Outer Loading

Variabel	Indikator	Outer Loading	Hasil
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	X1.1	0,765	Valid
	X1.2	0,686	Valid
	X1.3	0,559	Valid
	X1.4	0,518	Valid
	X1.5	0,742	Valid
	X1.6	0,497	Tidak Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	X2.1	0,580	Valid
	X2.2	0,645	Valid
	X2.3	0,706	Valid
	X2.4	0,697	Valid
	X2.5	0,893	Valid
	X2.6	0,901	Valid
	X2.7	0,657	Valid
	X2.8	0,708	Valid
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3)	X3.1	0,716	Valid
	X3.2	0,615	Valid
	X3.3	0,845	Valid
	X3.4	0,526	Valid
	X3.5	0,662	Valid
	X3.6	0,588	Valid
	X3.7	0,599	Valid
	X3.8	0,697	Valid
	X3.9	0,813	Valid
	X3.10	0,749	Valid

Pengamanan Aset Tetap Daerah (Y)	Y1	0,524	Valid
	Y2	0,636	Valid
	Y3	0,715	Valid
	Y4	0,746	Valid
	Y5	0,852	Valid
	Y6	0,753	Valid

Sumber: Penulis, 2021

Pengujian awal pada analisis outer model bertujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas model. Dari tabel 4 dapat disimpulkan bahwa syarat memenuhi *convergent validity* yaitu nilai *outer loading* setiap indikator antara 0,5 - 0,6. Akan tetapi untuk hasil uji yang menunjukkan tidak valid harus dieliminasi dan dilakukan pengujian ulang untuk mendapatkan hasil yang valid. Berikut adalah tabel nilai *outer loading* setelah pengujian kembali :

Tabel 5. Nilai Outer Loading Setelah Pengujian Kembali

Variabel	Indikator	Outer Loading	Hasil	
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	X1.1	0,806	Valid	
	X1.2	0,654	Valid	
	X1.3	0,651	Valid	
	X1.5	0,784	Valid	
	X1.6	0,497	Tidak Valid	
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	X2.1	0,580	Valid	
	X2.2	0,645	Valid	
	X2.3	0,707	Valid	
	X2.4	0,697	Valid	
	X2.5	0,893	Valid	
	X2.6	0,901	Valid	
	X2.7	0,656	Valid	
	X2.8	0,707	Valid	
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3)	X3.1	0,732	Valid	
	X3.2	0,837	Valid	
	X3.4	0,600	Valid	
	X3.5	0,612	Valid	
	X3.7	0,692	Valid	
	X3.8	0,807	Valid	
	X3.9	0,771	Valid	
	X3.10	0,659	Valid	
	Pengamanan Aset Tetap Daerah (Y)	Y1	0,517	Valid
		Y2	0,637	Valid
Y3		0,718	Valid	
Y4		0,746	Valid	
Y5		0,852	Valid	
Y6		0,754	Valid	

Sumber: Penulis, 2021

Dari hasil pengujian kembali nilai *outer loading* terdapat indikator yang dieliminasi, diantaranya indikator X1.4, X1.6, X3.3, dan X3.6.

Tabel 6. Average Variant Extracted (AVE)

Variabel	Nilai AVE
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,529
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,535
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,516
Pengamanan Aset Tetap Daerah	0,507

Sumber: penulis, 2021

Selanjutnya yaitu pengujian *discriminant validity* dengan melihat nilai AVE. Dari tabel 6 diketahui nilai AVE semua variabel > 0,5. Artinya semua variabel telah memiliki *discriminant validity* yang baik.

Tabel 7. Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,817	0,713
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,900	0,872
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,894	0,863
Pengamanan Aset Tetap Daerah	0,858	0,805

Sumber: Penulis, 2021

Pengujian terakhir dari analisis *outer model* adalah uji reliabilitas. Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa tingkat reliabilitas variabel independen dan dependen dalam penelitian memiliki nilai yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *composite reliability* > 0,6 dan *cronbach's alpha* > 0,7.

Tabel 8. Koefisien Determinasi dan Predictive Relevance

Variabel	R-Square	Q-Square
Pengamanan Aset Tetap Daerah	0,432	0,154

Sumber: Penulis, 2021

Setelah analisis *outer model* selanjutnya yaitu analisis *inner model* dengan melihat nilai R-Square dan Q-Square. Dari tabel 8 dapat diketahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu 43,2% dan sisanya 56,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

Selain itu juga dilakukan uji *Predictive relevance* untuk menentukan seberapa baik nilai penelitian yang dihasilkan oleh model. Dalam penelitian ini nilai Q-Square sebesar 0,154 menunjukkan model mempunyai *predictive relevance* yang baik.

Tabel 9. T-Statistics dan P-Values

Hipotesis	T-Statistics	P-Values	Hasil
H1	1,173	0,241	Ditolak
H2	1,180	0,239	Ditolak
H3	2,724	0,007	Diterima

Sumber: Penulis, 2021

Dari tabel 9 dapat diketahui bahwa H1 dinyatakan ditolak karena memiliki nilai *T-Statistics* sebesar 1,173 dan H2 juga dinyatakan ditolak karena memiliki nilai *T-Statistics* 1,180. Sedangkan H3 dinyatakan diterima karena memiliki nilai *T-Statistics* 2,724 dan *P-Values* 0,007.

4.2 Pembahasan

Dari hasil analisis model dan pengujian hipotesis, maka dapat diketahui bahwa hanya satu variabel yang berpengaruh terhadap pengamanan aset tetap daerah. Penjelasan setiap variabel independen adalah sebagai berikut :

1. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Hasil analisis dan uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai *T-Statistics* sebesar 1,173 dan *P-Values* sebesar 0,241. Artinya kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset tetap daerah. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya partisipasi pegawai untuk mengembangkan keterampilan yang telah dimiliki. Dengan meningkatkan keterampilan kinerja pegawai akan lebih efektif dan efisien. Kesalahan-kesalahan yang terjadi juga dapat diminimalisir. Selain itu, motivasi pegawai untuk menambah pengetahuan dengan membaca literatur berupa jurnal atau buku-buku dapat dikatakan belum maksimal. Sehingga dapat menimbulkan keterlambatan penerimaan informasi yang ada keterkaitannya dengan aset daerah.

Hasil uji hipotesis memperkuat (Aljufri Bokingo 2017) dalam penelitiannya, dimana Aljufri Bokingo memperoleh hasil bahwa

secara parsial besar/kecilnya kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengamanan barang milik daerah.

2. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Hasil analisis dan uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai *T-Statistic* sebesar 1,180 dan *P-Values* sebesar 0,239. Artinya pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset tetap daerah. Hal tersebut disebabkan karena belum sepenuhnya teknologi informasi yang digunakan dimanfaatkan dengan baik seperti jumlah unit komputer yang belum cukup dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tidak adanya tenaga ahli (teknisi) dalam unit kerja. Selain itu, sering adanya pembaruan sistem yang mengakibatkan efektivitas kinerja pegawai menurun karena membutuhkan waktu untuk memahami setiap perubahan sistem yang baru.

Terdapat kesamaan hasil uji hipotesis dengan penelitian (Wahyuni 2018) yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap pengamanan aset tetap daerah.

3. Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3)

Hasil analisis dan uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai *T-Statistics* sebesar 2,724 dan *P-Values* sebesar 0,007. Artinya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset tetap daerah. Dengan meningkatnya kualitas sistem pengendalian intern yang dimiliki instansi pemerintahan maka akan meningkat pula kualitas pengamanan aset daerah yang dilakukan. Sehingga kerugian terhadap aset daerah, tindak kecurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh sumber daya manusia maupun sistem komputerisasi dapat minimalisir.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian (Astini 2018). Dalam penelitiannya disebutkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan aset tetap daerah. Sejalan dengan penelitian lain oleh (Pratami 2020) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh simultan terhadap pengamanan aset tetap daerah.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pengamanan aset tetap daerah. Kesimpulan dari hasil analisis dan uji hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset tetap daerah.
2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset tetap daerah.
3. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset tetap daerah.

5.2 Saran

Saran dari peneliti untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mendukung metode wawancara untuk memperkuat hasil pengumpulan data melalui kuesioner.
2. Peneliti berikutnya diharapkan mampu mengembangkan atau menambah variabel lain yang memiliki keterkaitan terhadap pengamanan aset tetap daerah.
3. Peneliti di masa mendatang diharapkan mampu melibatkan populasi dan sampel yang jumlahnya lebih besar daripada penelitian ini, dimana hal tersebut kemungkinan memiliki pengaruh pada hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljufri Bokingo, Muslimin, dan Nina Yusnita., 2017, *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penatausahaan, Pengawasan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah*, Jurnal Katalogis, 43-54.
- Astini, Yuli., 2018, *Kualitas Aparatur, Sistem Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Efektivitas Manajemen Aset Tetap*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vo. 13 No. 2, 173-184.
- Ekayanti., 2018, *Determinants Effectiveness Fixed Asset Management of District Government on the Island of Lombok*, International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER), 1219-1229.

- Hidayat, M. A., 2017, *Studi Kasus Permasalahan*, Universitas Mataram
- Juliadi, M., 2017, Pengaruh Kualitas Sumber Daya, Universitas Mataram
- Pratami, Raisa Anggita., 2020, *Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pengamanan Aset Tetap*, Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar.
- Rahmawati, Astika, I Wayan Mustika, dan Lilik Handaya., 2018, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan*, Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) , Republik, Indonesia., *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- , *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah* .
- Rosihan., 2016, Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, Sistem Informasi, dan Komitmen terhadap Manajemen Aset (Studi Pemerintah Provinsi Papua), Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Volume 2 Nomor 1, 2016: 1-16.
- Sugiyono., 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sutabri, Tata., 2014, *Pengantar Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi.
- Wahyuni, Sri., 2018, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Wibowo., 2016, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Yosefrinaldi., 2013, *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, Jurnal Akuntansi, 2013.
- Yoyo, Sudaryo., 2017, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: ANDI